

EVALUASI PELAKSANAAN SMART CITY DI KOTA PALANGKARAYA

¹Endah Widyastuti Ningsih

¹Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia

Email: endahwidyastutiningsih@gmail.com

Kata kunci:

Evaluasi Kebijakan,
Smart City, Kebijakan
Pemerintah Daerah

ABSTRAK

Smart City Kota Palangkaraya hadir sebagai tujuan untuk menyatukan visi dan upaya bersama dalam membangun kota yang cerdas, berbasis teknologi, dan berwawasan lingkungan guna menciptakan sebuah kota yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran secara deskriptif mengenai evaluasi pelaksanaan smart city di Kota Palangkaraya, dalam hal ini indikator yang dilihat yaitu efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan. Pada tahun 2023 Kota Palangkaraya terpilih sebagai kota yang mendapatkan pendampingan penyusunan masterplan smart city oleh Kementerian Kominfo RI. Setiap program yang berjalan sudah sesuai dengan roadmap, pelaksanaan smart city di Kota Palangkaraya masih berlangsung dan mengalami perkembangan secara bertahap setiap tahunnya.

ABSTRACT

Smart City Palangkaraya City exists as a goal to unite a common vision and effort in building a city that is smart, technology-based and environmentally friendly in order to create a city that is sustainable, innovative and inclusive. This research aims to find a descriptive picture regarding the evaluation of smart city implementation in Palangkaraya City, in this case the indicators looked at are effectiveness, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. The research method used is descriptive qualitative which is carried out by observing the research object to produce the required data. In 2023, Palangkaraya City was selected as a city that received assistance in preparing a smart city master plan by the Indonesian Ministry of Communication and Information. Every program that is running is in accordance with the roadmap, the implementation of smart city in Palangkaraya City is still ongoing and experiences gradual development every year.

Keywords:

*Policy Evaluation, Smart
City, Local Government
Policy*

PENDAHULUAN

Kota selalu menempati posisi yang sentral dalam perkembangan sejarah peradaban umat manusia. Kota berperan sebagai pusat pertumbuhan serta perkembangan baik bagi kota itu sendiri maupun merangsang perkembangan bagi wilayah di sekitarnya. Keberadaan kota terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan serta membawa pengaruh yang besar dalam pola hidup dan peradaban manusia. Namun demikian, semakin cepat dan besar pertumbuhan sebuah kota, maka cenderung semakin besar pula masalah yang muncul terhadap kota tersebut.

Berbagai isu dan permasalahan pembangunan perkotaan meliputi urbanisasi dan peningkatan penduduk perkotaan secara signifikan, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan, kemiskinan di perkotaan, kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan perkotaan di era desentralisasi, dan tingkat pertumbuhan antar kota yang belum berkembang.

Terkait berbagai permasalahan perkotaan diatas, kemudian memunculkan kebutuhan yang mendesak dan sekaligus tantangan untuk menemukan cara-cara yang cerdas dan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk perkotaan. Hadirnya konsep smart city (kota cerdas) muncul sebagai alternatif instrument yang inovatif dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan dan mulai diterapkan pada kota- kota besar di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Smart city memang sedang menjadi trend di Indonesia, bukan hanya sebagai bentuk gengsi untuk disebut sebagai kota cerdas, namun smart city adalah sebuah langkah yang hebat dalam memajukan kota dalam suatu negara dengan basis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara harfiah, smart city memang diartikan sebagai sebuah kota cerdas dengan konsep yang dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar efisien dan efektif.

Kementerian Dalam Negeri mendefinisikan Smart City sebagai konsep penataan kota secara terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan antara lain, menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju dan modern, meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi dan membangun fondasi Indonesia Smart Nation.

Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan konsep smart city namun belum sepenuhnya. Konsep smart city masih bergantung pada kota dan pengembang masing-masing daerah. Dalam hal ini sebuah konsep smart city diterapkan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada. Sebagaimana kebijakan berupa proyek atau program dalam pembangunan tata kelola kota dapat dijalankan dengan persetujuan dari Pemerintah yang bersangkutan.

Konsep smart city sendiri mempunyai peranan penting dalam pemerintahan, dengan adanya smart city diharapkan kota dapat memberikan pelayanan dengan memanfaatkan serta mengolah teknologi yang berkembang pada saat ini serta membangun infrastruktur cerdas berbasis teknologi dan memberikan pelayanan yang efektif serta efisien kepada masyarakat yang ada di kotanya. Smart city memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Konsep ini demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di kota seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi. Satu persatu sarana prasarana pemerintah termasuk barang dan pelayanannya memperbarui mekanisme pengoperasian. Pembaharuan dilakukan bukan dalam sekali waktu tetapi bertahap secara satu persatu dalam jangka waktu yang panjang.

Indonesia memasuki tatanan kebijakan yang mengusung konsep smart city sekitar tahun 2017 silam, dimana pemerintah mulai melakukan penyeleksian terkait wilayah yang cocok digunakan untuk uji coba kebijakan ini dengan harapan dapat mewujudkan kota-kota di Indonesia yang maju dan bisa memanfaatkan teknologi dengan semestinya. Penerapan konsep smart city sebagai kebijakan yang diberlakukan di beberapa kota besar di Indonesia, sebagai contoh DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, dan beberapa kota besar lainnya, begitu pula dengan kota-kota yang ada di Kalimantan khususnya Kota Palangkaraya.

Keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan Kota Palangkaraya menuju smart city dapat dilihat melalui visi dan misi Walikota Palangkaraya periode 2018-2023 yang mana pembangunan smart city menjadi point penting dalam memajukan Kota Palangkaraya, serta sebagai salah satu upaya dalam memasifkan gerakan kebijakan smart city yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah di Indonesia.

Adapun legal hukum yang memuat kebijakan smart city tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2018- 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan smart city tersebut, Pemerintah Kota Palangkaraya menghadirkan Roadmap Implementasi Pengembangan TIK Smart City Kota Palangkaraya yang tertuang di dalam Rencana Induk (Master Plan) TIK Kota Palangkaraya Tahun 2019-2024 sebagai acuan yang jelas agar dapat dicapai terencana dan tepat sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran secara deskriptif mengenai proses pelaksanaan kebijakan publik pada fase kelima dalam hal ini yaitu evaluasi pelaksanaan smart city di Kota Palangkaraya, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung proses pelaksanaannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan. Penelitian ini mengamati tindakan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam penerapan smart city, maka dari itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi literatur (Kartono, 1998; Efron and Ravid. 2019) yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan mengenai penerapan smart city di Kota Palangkaraya. Peneliti mengamati peraturan pemerintah, artikel, media online, media cetak, dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan penerapan smart city tersebut.

Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu analisis data, yang bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami sehingga mencapai suatu kesimpulan yang tepat dan tersusun secara sistematis. Dalam menganalisis data

peneliti akan menggunakan model interaktif (Hardani, et. Al, 2020) yang menganalisis indikator-indikator evaluasi pelaksanaan smart city (William N. Dunn (1999:609)) di Kota Palangkaraya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Smart City Kota Palangkaraya

1. Smart Government

Secara umum, kondisi Kota Palangkaraya pada dimensi smart governance adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Peraturan daerah berupa RPJMD yang memiliki misi yang sudah mencerminkan dimensi smart city: Misi pembangunan yang mencerminkan dimensi Smart City menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif dan program Smart City. Peraturan ini mencakup kebijakan, rencana, serta aturan yang mengatur langkah-langkah strategis dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pemerintah, dan berbagai sektor lainnya di dalam kota.
- b. Adanya Peraturan Kepala daerah tentang Tim Pelaksana Smart City Daerah: Bertujuan untuk membentuk kelompok kerja yang akan bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program Smart City di tingkat daerah. Tim ini terdiri dari berbagai ahli dan pemangku kepentingan yang akan bekerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan strategi, serta mengawasi pelaksanaan inisiatif Smart City secara holistic.
- c. Jangkauan Jaringan 4G di Seluruh Kota: Pentingnya memiliki jangkauan jaringan 4G yang merata di seluruh kota adalah untuk mendukung konektivitas yang lancar dan cepat bagi semua warga serta sektor ekonomi. Dengan jaringan yang andal dan cepat, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, layanan pemerintah, dan berbagai aplikasi pintar yang mendukung kehidupan sehari-hari. Jaringan 4G yang luas juga menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi lebih lanjut seperti Internet of Things (IoT) untuk mendukung konsep Smart City yang lebih maju.
- d. Keberadaan TIK yang Mendukung Kemajuan Usaha di Berbagai Sektor: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang canggih dan terintegrasi mendukung perkembangan usaha di berbagai sektor. Misalnya, sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan platform e-learning dan akses informasi yang mudah bagi siswa dan guru. Di sektor kesehatan, teknologi digunakan untuk pelayanan kesehatan jarak jauh, pengumpulan data kesehatan, dan manajemen logistik obat. Sementara pada sektor bisnis dan industri dapat meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen dengan mengadopsi solusi TIK seperti analitik data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi.
- e. Terdapat Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik: Transparansi informasi dan partisipasi masyarakat sangat penting. Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi

publik bertanggung jawab dalam menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat, mengelola platform komunikasi dengan warga, dan menyebarkan informasi terkini mengenai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui portal resmi dan semua sosial media yang dimiliki oleh pemerintah kota.

2. Smart Branding

Dimensi smart branding pada Kota Palangkaraya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Produk Unggulan Daerah yang Khas dan Eksotis: Kota Palangkaraya memiliki produk unggulan yang khas dan eksotis, seperti makanan khas, kerajinan tangan, tekstil tradisional, dan produk-produk local lainnya. Produk-produk ini mencerminkan identitas budaya dan kekayaan alam daerah tersebut. Pengembangan dan promosi produk unggulan ini menjadi peluang untuk menarik wisatawan yang mencari pengalaman berbeda dan autentik. Dengan memperkuat branding produk unggulan daerah, dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.
- b. Kondisi Alam dan Geografis yang masih Cukup Banyak Kawasan Hijau: Palangkaraya sebagai daerah kondisi alam dan geografis yang masih memiliki banyak kawasan hijau menyajikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk beraktivitas outdoor, melakukan kegiatan ekowisata, dan menikmati keindahan alam yang menyejukan. Pengelolaan kawasan hijau dengan baik juga mendukung keberlanjutan pariwisata dan konservasi lingkungan.
- c. Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata: Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Palangkaraya menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan untuk berkunjung dan tinggal lebih lama di Kota Palangkaraya. Sarana dan prasarana yang berkualitas seperti bandara, terminal transportasi, jalan-jalan yang baik, fasilitas akomodasi, restoran, toko-toko souvenir, hotel, resort, penginapan tradisional, dan pusat informasi pariwisata, akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan selama berada di daerah. Investasi dalam pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata juga perlu ditingkatkan agar wisatawan dapat merasa puas dan Kembali berkunjung di masa mendatang.
- d. Kekayaan Adat dan Budaya: Warisan adat dan budaya Kota Palangkaraya menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang tertarik untuk mengenal kearifan lokal dan tradisi masyarakat setempat. Seni, tari, musik, festival, upacara adat, dan kegiatan budaya lainnya memberikan pengalaman berharga bagi para wisatawan untuk memahami sejarah dan keberagaman budaya Indonesia. Upaya pelestarian dan promosi budaya daerah ini akan membantu memperkuat identitas lokal serta menarik kunjungan wisatawan yang ingin merasakan keunikan dan kekayaan budaya setempat.

3. Smart Economy

Kondisi Kota Palangkaraya pada dimensi smart economy secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kondisi dan Arah Ekonomi Palangkaraya menjadi Penggerak Pelaku Ekonomi dan Stakeholder: Menunjukkan adanya peluang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota. Jika ekonomi kota berada pada jalur yang positif dan berdaya saing maka akan meningkatkan investasi dan bisnis. Hal ini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Dengan memanfaatkan kondisi ekonomi yang baik dan arah pembangunan yang tepat, Palangkaraya dapat menjadi destinasi yang menarik bagi investor dan pebisnis.
- b. Masyarakat yang Memiliki Usaha Kecil (UMKM): Kota Palangkaraya memiliki banyak masyarakat yang berperan sebagai pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Kehadiran UMKM ini mencerminkan tingginya tingkat kewirausahaan dan inovasi di kalangan masyarakat lokal. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan memperkaya produk dan layanan yang ditawarkan kepada wisatawan. Dukungan dan pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pelatihan, pembiayaan, dan akses pasar akan membantu mengangkat sektor ekonomi lokal dan memperkuat ekonomi kreatif di kota ini.
- c. Sumber Daya Alam yang Cukup Melimpah: Kota Palangkaraya memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, seperti hutan tropis, sungai, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam ini menjadi aset berharga untuk mengembangkan sektor pariwisata alam dan ekowisata. Wisata alam dan ekowisata menarik minat wisatawan yang mencari pengalaman menyatu dengan alam dan kehidupan pedesaan. Melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sumber daya alam Kota Palangkaraya dapat menjadi daya tarik utama dan menjadikan kota ini sebagai destinasi pariwisata yang unik.

4. Smart Living

Pada dimensi smart living, sebagai sebuah dimensi yang strategis di dalam elemen smart city di Palangkaraya, yang mana memiliki kondisi sebagai berikut:

- a. Wilayah yang Sangat Luas: Wilayah luas yang dimiliki Kota Palangkaraya menjadi salah satu kekuatan dalam dimensi smart living. Wilayah yang luas menyediakan ruang untuk pengembangan infrastruktur, perencanaan kota yang lebih terarah, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, wilayah yang luas juga memberikan potensi untuk pengembangan sektor pariwisata.
- b. Digunakannya Transportasi Air sebagai Aktivitas Sehari-hari: Kota Palangkaraya memiliki keunikan dalam penggunaan transportasi air sebagai aktivitas sehari-hari, dimana Kota Palangkaraya memiliki sungai besar yang melintasi kota ini yaitu salah satunya Sungai Kahayan. Transportasi air masih menjadi salah satu sarana penting untuk mobilisasi penduduk dan distribusi barang. Pemanfaatan transportasi air ini menjadi aset penting dalam merancang system transportasi yang berkelanjutan dan efisien, serta dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati pelayaran di sungai yang eksotis.

- c. Memiliki Bandara dengan Pelayanan Penerbangan Nasional: Adanya bandara dengan pelayanan penerbangan nasional di Kota Palangkaraya menjadi kekuatan penting dalam memfasilitasi konektivitas dan mobilitas penduduk serta pariwisata. Bandara yang melayani penerbangan nasional memungkinkan akses mudah dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke Kota Palangkaraya. Dengan demikian, bandara ini menjadi jembatan penghubung yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kota ini.
 - d. Dukungan oleh Keberadaan Institusi Pendukung (Perbankan, Pendidikan, Transportasi, dan Rekreasi): Kota Palangkaraya memiliki keberadaan institusi pendukung yang cukup lengkap, seperti perbankan, pendidikan, transportasi, rekreasi, dan sektor-sektor pendukung lainnya. Keberadaan infrastruktur ini memberikan dukungan penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkualitas bagi penduduk kota. Institusi pendidikan yang berkualitas memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terdidik. Selain itu, kehadiran fasilitas rekreasi dan transportasi yang memadai dapat meningkatkan kualitas hidup dan daya tarik kota itu sendiri.
5. Smart Society

Kota Palangkaraya dalam dimensi smart society memiliki kondisi sebagai berikut:

- a. Banyaknya Jumlah Masyarakat Akseptor yang Mendukung dalam Program KB: Banyaknya dukungan masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu kekuatan pada dimensi smart society di Kota Palangkaraya. Partisipasi aktif masyarakat dalam program KB berkontribusi pada pengendalian pertumbuhan penduduk dan perencanaan keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dukungan masyarakat terhadap program KB, Kota Palangkaraya dapat menghadapi tantangan terkait pertumbuhan penduduk secara lebih efektif dan berkelanjutan.
- b. Angka dari Angkatan Kerja yang Menamatkan Pendidikan Universitas Berada di Posisi Tertinggi Kedua di Kalimantan Tengah: Tingginya jumlah lulusan universitas mencerminkan adanya potensi sumber daya manusia yang terdidik dan berkualitas di kota ini. Lulusan universitas yang terampil dan terdidik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi dan inovasi di berbagai sektor. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia ini, Kota Palangkaraya dapat menjadi lebih kompetitif dan mendorong kemajuan sosial-ekonomi di wilayahnya.
- c. Banyaknya Lembaga Pendidikan di Kota Palangkaraya: Lembaga pendidikan di Kota Palangkaraya menjadi kekuatan penting dalam menciptakan smart society. Keberadaan Lembaga Pendidikan yang beragam, termasuk sekolah dasar, menengah, tinggi, serta institusi pendidikan non-formal, memfasilitasi akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang. Dengan adanya Lembaga Pendidikan yang cukup, masyarakat memiliki akses untuk meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan.

6. Smart Environment

Dimensi smart environment di Kota Palangkaraya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Terdapatnya Sekolah Peduli Lingkungan: Sekolah peduli lingkungan yang ada di Kota Palangkaraya menjadi salah satu kekuatan pada dimensi smart environment. Sekolah-sekolah yang peduli terhadap lingkungan memiliki peran penting dalam mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan praktik ramah lingkungan. Melalui program-program edukasi dan kesadaran lingkungan yang diterapkan di sekolah-sekolah, generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam upaya melestarikan lingkungan di masa depan. Sekolah peduli lingkungan juga dapat berkontribusi dalam mengajarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana.
- b. Terdapatnya TSAK (Tim Serbu Api Kelurahan) yang Sangat Aktif dan Didukung oleh Kelompok Masyarakat: Kehadiran TSAK merupakan tim pemadam kebakaran tingkat kelurahan yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran. Dengan adanya TSAK yang aktif diikuti dengan partisipasi aktif masyarakat, resiko bencana kebakaran dapat dikelola lebih baik, dan dukungan terhadap TSAK akan memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan.
- c. Meningkatnya Jumlah Taman Hijau Tiap Tahun: Jumlah taman hijau yang tiap tahunnya meningkat di Kota Palangkaraya menjadi kekuatan positif dalam dimensi smart environment. Taman hijau berperan sebagai paru-paru kota yang menyediakan area terbuka hijau untuk masyarakat, menyediakan ruang resapan air, dan membantu meningkatkan kualitas udara. Dengan meningkatnya jumlah taman hijau, kota ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi dampak polusi udara, serta meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan bagi penduduk. Pengembangan dan pemeliharaan taman hijau perlu terus didorong untuk menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Evaluasi Pelaksanaan Smart City Kota Palangkaraya

Dalam proses kebijakan publik terdapat lima tahapan yaitu, Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Pembuat Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan (Michael Howlet & M Ramesh. 1995: 11). Pada penelitian ini peneliti berada pada tahapan yang kelima yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan smart city di Kota Palangkaraya. Menurut Dunn (1994), dalam melakukan evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan agar mendapatkan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program kebijakan tersebut.

Untuk menilai keberhasilan sebuah kebijakan ada beberapa indikator atau kriteria evaluasi yang mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh Dunn (2003: 405) yaitu, Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan suatu kebijakan apakah sudah mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan, yang mana dalam hal ini adalah pelaksanaan kebijakan smart city di Kota Palangkaraya. Pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yakni melalui Roadmap Implementasi Pengembangan TIK Smart City Kota Palangkaraya yang telah diluncurkan pada tahun 2019 yang termuat dalam kajian konsep Pengembangan Smart City Berbasis Kearifan Lokal di Kota Palangkaraya. Pada rentang waktu dari 2019-2023 terfokus pada penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, pengembangan aplikasi, dan e-layanan publik.

Pada tahun 2023, Kota Palangkaraya menjalani pendampingan penyusunan masterplan smart city secara komprehensif bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bimbingan teknis yang dilakukan merupakan wujud dari pengembangan sumber daya manusia, yang mana sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak empat kali, dimulai pada bulan Juli sampai bulan Oktober 2023 dalam rangka penyusunan masterplan smart city sekaligus penguatan kapasitas aparatur kota.

Kemudian e-layanan publik atau pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi digital pada Pemerintah Kota Palangkaraya dapat dilihat melalui Mal Pelayanan Publik, seperti pelayanan kependudukan dan catatan sipil melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital, kemudian pembuatan/perpanjangan SIM atau pembuatan SKCK online yang bekerjasama dengan Polresta Palangkaraya pada aplikasi SINAR dan pelayanan BPJS pada aplikasi Mobile JKN. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Palangkaraya juga memiliki website resmi yaitu palangkaraya.go.id yang mana sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat, serta aplikasi LAPOR yang merupakan aplikasi pengaduan online bentuk kerjasama KemenPAN, Ombudsman RI, dan Kantor Staff Kepresidenan.



Sumber: Executif Summary Masterplan Smart City Kota Palangkaraya

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat diartikan bahwa tujuan yang telah dicapai sudah dapat dirasakan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas, dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau

kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kebijakan smart city Kota Palangkaraya telah melewati tahapan analisis masalah apa saja yang sedang terjadi di tengah masyarakat kota sebagai suatu sasaran yang akan dicapai, sehingga bisa dirumuskan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini hasil yang dapat dilihat dari pelaksanaan smart city Kota Palangkaraya adalah melalui beberapa program yang sedang berjalan, Pemerintah Kota Palangkaraya dalam menjalankan programnya tentu tidak sendirian, ada beberapa pihak yang berkolaborasi dalam mensukseskan program-program yang akan dicapai tersebut.

Smart City Kota Palangkaraya bertujuan untuk menyatukan visi dan upaya bersama dalam pembangunan kota yang cerdas, berwawasan lingkungan dan berbasis teknologi. Adapun penyatuan visi ini diwujudkan dalam penandatanganan Lembar Komitmen Bersama Menuju Palangkaraya Kota Cerdas (Smart City) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 oleh seluruh stakeholder dan seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah kota. Selain menjalin komitmen bersama dengan seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kota Palangkaraya juga menjalin kerjasama dengan akademisi dari institusi pendidikan, dalam hal ini yaitu Tim Peneliti LPPM Universitas Palangkaraya. Jalinan kerjasama ini merupakan gerbang awal dari terlaksananya berbagai program kerja kebijakan smart city di Palangkaraya.

Hasil yang dapat dilihat dari kerjasama dengan institusi pendidikan tersebut adalah lahirnya kajian konsep pengembangan smart city Kota Palangkaraya, yang kemudian berkembang menjadi penyusunan draft masterplan smart city Kota Palangkaraya.

Ada beberapa program kerja yang sudah berjalan sesuai dengan roadmap diantaranya yaitu Program Command Center yang berada di Kantor Walikota Palangkaraya, sebagai pusat informasi bagi masyarakat serta sebagai alat pengawasan dan keamanan di lingkup perkantoran Pemerintah Kota Palangkaraya. Kedua yaitu adanya Mal Pelayanan Publik yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangkaraya, hadirnya Mal Pelayanan Publik ini merupakan solusi bagi masyarakat Kota Palangkaraya dalam melakukan keperluan administrasi yang sudah terintegrasi dalam satu pintu.

Meskipun belum semua program dapat terlaksana, namun beberapa program lainnya sudah tersusun untuk dijalankan dalam beberapa tahun ke depan. Program-program ini dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu:

1. Jangka pendek (2024), dimana pelaksanaan program quickwins dan program smart city jangka pendek menjadi target utama dalam periode ini. Pada jangka pendek berbagai program rencana aksi dan penguatan sumber daya utama kota untuk memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai pelaku pembangunan smart city menjadi fokus utama.
2. Jangka menengah (2025), periode ini akan penuh pada pengembangan berbagai layanan inovatif dan solusi smart city, serta pelaksanaan program-program jangka menengah yang menjadi kelanjutan dari program quickwins smart city Palangkaraya yang telah berjalan.

3. Jangka panjang (2029), periode ini menjadi tonggak pembangunan smart city Kota Palangkaraya yang komprehensif dan holistic dimana seluruh sektor kehidupan kota telah memiliki layanan dan solusi smart city, sehingga integrasi antar layanan menjadi bagian tidak terpisahkan pada periode ini.

Pemerataan

Dalam kebijakan publik pemerataan dapat dikatakan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh dari sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang dampaknya atau usahanya dapat didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu dapat dikatakan efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaatnya diterima secara merata. Maka kunci dari pemerataan yaitu keadilan dan kewajiban, artinya seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Pada pelaksanaan kebijakan smart city Kota Palangkaraya, pembiayaan pada program-program smart city jangka pendek dan menengah masih mengandalkan pembiayaan dari pemerintah daerah/APBD. Adapun manfaat langsung yang sudah dapat dirasakan oleh warga Kota Palangkaraya yaitu diantaranya:

1. Layanan Bus BRT (Bus Rapid Transit) Kota Palangkaraya, Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya telah menyediakan layanan bus gratis, dalam layanan ini terdapat empat tujuan rute. Rute Pertama untuk Pelayanan Kesehatan, tujuan rumah sakitnya adalah RSUD Kalampangan, hal ini merupakan salah satu wujud dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dalam hal memperoleh layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh elemen masyarakat. Rute Kedua untuk Pelayanan Administrasi Penduduk, tujuannya adalah KPP Pratama Palangkaraya, Dukcapil Kota, dan Mall Pelayanan Publik, dalam hal ini merupakan bentuk dari layanan publik ke masyarakat melalui lembaga publik yang terbuka, komunikatif, responsif, dan inovatif, serta menjadi sarana bagi partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan publik khususnya dalam hal pelayanan publik. Rute Ketiga untuk Pelayanan Pasar, tujuannya adalah Pasar Kahayan dan Pasar Citra, kemanfaatan yang dirasakan sangat besar terhadap perputaran roda utama perekonomian masyarakat Kota Palangkaraya, dimana pasar berperan sebagai pusat perputaran uang daerah. Rute Keempat untuk Pelayanan Terminal, tujuannya adalah Terminal W. A. Gara, yang mana terminal merupakan pintu dari arus keluar masuknya masyarakat dari luar daerah ke dalam kota begitupun sebaliknya. Bus BRT beroperasi setiap hari Senin sampai Jumat, dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB. Hadirnya bus BRT sangat membantu dalam mobilisasi warga dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, kemanfaatan ini juga menjadi indikator dalam kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.
2. Operasi Pasar Sembako, Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangkaraya menyelenggarakan operasi pasar sembako murah, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam

mendapatkan bahan pokok sehari-hari dengan harga murah dan terjangkau. Selain membantu masyarakat akan kebutuhan sembako dan menjaga daya beli masyarakat, kegiatan ini juga dalam rangka menekan laju inflasi. Operasi pasar sembako sendiri merupakan salah satu program subsidi dari pemerintah, kegiatan ini bersifat reguler yang diadakan setiap tahunnya. Kegiatan ini menjangkau sampai ke kelurahan-kelurahan terpencil atau kelurahan yang berada di daerah aliran sungai yang letaknya di pinggiran Kota Palangkaraya, seperti Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Bukit, dan Kelurahan Panjehang di Kecamatan Rakumpit, serta Kecamatan Bukit Batu.

3. Festival Palangkaraya, merupakan agenda budaya tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya menjelang HUT Pemerintah Kota Palangkaraya dan HUT Kota Palangkaraya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai seni, tradisi, dan budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya. Terdapat beberapa even yang digelar, seperti pameran, unjuk bakat, live musik, berbagai perlombaan, dan UMKM. Tidak hanya sebagai sarana dalam pelestarian seni dan budaya lokal Kalimantan Tengah, Festival Palangkaraya ini juga sebagai sarana perekat kebersamaan dan persatuan. Kegiatan ini juga merupakan inovasi dalam memasarkan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah melalui pengenalan wajah kota yang ditampilkan lewat promosi wisata melalui pameran budaya yang menunjukkan kreativitas olahan hasil bumi Kalimantan, kemudian UMKM yang diikutsertakan dapat menjadi media promosi kuliner khas Palangkaraya, dan juga berbagai perlombaan keterampilan, kesenian dan olahraga tradisional. Agenda tahunan ini juga sebagai sarana hiburan bagi warga Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan sebagai penjangkauan bibit-bibit berbakat dan berkualitas sehingga dapat menjadi perwakilan daerah di tingkat nasional hingga internasional.
4. Klinik Hewan Pemko, klinik hewan ini dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya yang diperuntukan untuk warga Kota Palangkaraya dalam hal pengobatan hewan peliharaan yang diberikan secara gratis. Tidak hanya pengobatan, klinik hewan pemko juga melayani konsultasi, pemeriksaan hewan dan pelayanan vaksin rabies. Hadirnya klinik hewan pemko sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal pengobatan hewan peliharaan dan kesehatan masyarakat yang memiliki hewan peliharaan tersebut atau yang sering disebut kesehatan masyarakat veteriner, karena sering kali banyak penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia. Salah satu yang paling umum adalah rabies, peran klinik hewan pemko mengendalikan persebaran penyakit rabies yang umumnya ditularkan oleh hewan kucing dan anjing adalah dengan pemberian vaksin rabies gratis kepada seluruh masyarakat. Tidak hanya dalam hal penularan penyakit berbahaya, klinik ini juga membantu menekan lonjakan populasi dari hewan kucing maupun anjing dengan memberikan program steril gratis, biasanya steril gratis dilakukan menjelang peringatan hari Rabies Dunia. Klinik hewan pemko beroperasi setiap hari kerja pada hari Senin sampai Jumat, pukul 09:00 WIB sampai dengan

pukul 15:00 WIB, lokasi klinik berada tepat disebelah Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yaitu tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Responsivitas dalam hal ini yaitu tanggapan masyarakat Kota Palangkaraya terhadap pelaksanaan kebijakan Smart City Kota Palangkaraya. Masyarakat menyambut baik kebijakan ini, dengan mendukung penuh program-program kebijakan yang berjalan. Beberapa bentuk dukungan masyarakat dapat dilihat dari swadaya masyarakat dalam membentuk organisasi cepat tanggap sebagai partner maupun perpanjangan tangan dari pemerintah terhadap kejadian atau masalah yang sedang terjadi pada saat itu.

Beberapa organisasi tersebut adalah Emergency Response PLK (ERP) yang merupakan organisasi kecil non profit yang membantu dalam keadaan darurat. ERP bermarkas di Pos Polisi Bundaran Besar Palangkaraya. Kemudian ada Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Swakarsa Putra Pahandut yang merupakan relawan pemadam kebakaran, yang terakhir yaitu RSAT (Rumah Singgah Agung Testi) Palangkaraya, dimana RSAT merupakan relawan untuk mengevakuasi hewan liar maupun hewan peliharaan yang biasanya ditemukan hilang ataupun terluka. Tidak hanya mengevakuasi, RSAT juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan vaksin rabies gratis dan vitamin gratis kepada seluruh hewan peliharaan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Palangkaraya dengan berkeliling kota dan menginformasikan jadwal vaksin melalui akun instagramnya.

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut diatas didokumentasikan ke dalam media sosial yang merupakan akses terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung dan terbaru. Tidak hanya itu, bentuk dukungan masyarakat pun datang dari berbagai pelaku usaha UMKM, dimana pelaku-pelaku usaha tersebut berperan aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya.

Dengan dukungan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah, Pemerintah Kota Palangkaraya dengan sangat yakin bahwa kebijakan smart city akan sepenuhnya berhasil diterapkan di Kota Palangkaraya, dukungan juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi dalam setiap langkah pelaksanaan smart city, selain itu juga akan membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola perkembangan kotanya, dukungan yang hadir sebagai bentuk motivasi agar pemerintah

dapat bekerja lebih maksimal dalam mewujudkan Smart City Palangkaraya dan pemerintah juga menerima masukan dari masyarakat di berbagai platform milik pemerintah sebagai bahan evaluasi perbaikan dan perkembangan setiap tahunnya dari program-program yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan untuk kemudian dapat direalisasikan dengan baik di Kota Palangkaraya.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program, yaitu apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi adalah dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak, dalam hal ini alternatif kebijakan yang dimaksud adalah Smart City Kota Palangkaraya.

Kebijakan Smart City Kota Palangkaraya telah dimulai pada tahun 2019 yang kemudian kebijakan ini berkembang dan diimplementasikan secara bertahap hingga sekarang. Pada Senin 28 Februari 2023 Pemerintah Kota Palangkaraya menandatangani nota kesepakatan (MoU) Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas (Smart City) bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar dapat lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Sebelumnya Kota Palangkaraya telah melalui proses assessment yang dilakukan pada tahun 2022 tepatnya pada hari Kamis 14 April 2022. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Kominfo RI melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk mengukur kesiapan dan memilih kabupaten/kota yang akan mendapatkan pendampingan penyusunan Masterplan Smart City, dan Kota Palangkaraya terpilih masuk ke dalam 50 Kabupaten/Kota penerima pendampingan penyusunan Masterplan Smart City.

Penilaian terhadap Kota Palangkaraya dilakukan dengan mempertimbangkan enam indikator smart city, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Dipaparkan juga visi misi hingga implementasi kebijakan e- Government di Palangkaraya. Kegiatan assessment ini dihadiri lima asesor dari Kementerian Kominfo RI yang diselenggarakan melalui video conference dari Ruang Command Center Kantor Walikota Palangkaraya.

Kebijakan smart city ini telah tepat diterapkan di Kota Palangkaraya, hadirnya smart city mendorong kemudahan penyelenggaraan layanan publik dengan pemanfaatan teknologi yang kemudian juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Palangkaraya, maka dari itu diperlukan adanya kerjasama yang sinergi dan

strategis di antara semua pihak dan seluruh stakeholder agar smart city di Palangkaraya dapat diimplementasikan secara optimal.

KESIMPULAN

Kebijakan Smart City Kota Palangkaraya yang telah dimulai sejak tahun 2019, dimana pada waktu tersebut mulai dilaksanakan kajian konsep Pengembangan Smart City Berbasis Kearifan Lokal di Palangkaraya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya bersama akademisi dari Universitas Palangkaraya. Sebagai kesungguhan kelanjutan inisiatif tersebut, pada tahun 2023 Palangkaraya menjalani pendampingan penyusunan masterplan smart city secara komprehensif bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Implementasi kebijakan Smart City di Palangkaraya dalam setiap programnya sudah berjalan sesuai dengan time line yang direncanakan. Proses pengimplementasian kebijakan ini dilakukan secara bertahap hingga tahun 2033 mendatang, setiap tahunnya dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana proses sudah berjalan dan melihat program mana saja yang dapat dilanjutkan atau diperbaiki. Setiap indikator dalam evaluasi, yang mana dalam penelitian ini ada lima indikator yaitu Efektivitas, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Indikator-indikator tersebut mencerminkan kebutuhan, preferensi dan nilai yang nyata terhadap pelaksanaan program-program Smart City Palangkaraya.

Setiap proses dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya tetap harus berjalan dan konsisten, oleh karena itu kesinambungan smart city di Palangkaraya merupakan komitmen dari segenap stakeholder yang ada di Kota Palangkaraya sebagai sebuah tindakan kolektif yang nyata dimana melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas lokal dan tentu saja warga Kota Palangkaraya. Setiap kebijakan, proyek, dan inovasi yang diimplementasikan adalah langkah nyata menuju visi bersama, melalui kolaborasi yang erat, transparansi, dan komunikasi yang efektif, dapat dipastikan setiap aspek dari smart city dapat dikelola dengan cara yang cerdas dan bertanggungjawab sehingga kedepannya dapat diciptakan Palangkaraya yang tidak hanya cerdas dalam teknologi tetapi juga hangat dengan semangat kolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmawidjaja, Endra S; Sastra, Zaldy; Akbar, Nadya Rahmrani. 2015. Kajian Pengembangan Smart City di Indonesia. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. <https://simantu.pu.go.id>
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hasibuan, Abdurrozzaq & Sulaiman, Oris Krianto. 2019. Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. Buletin Utama Teknik Vol. 14, No. 2. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/download/1097/853>
- Herabudin. 2016. Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi. Bandung: CV.

- Pustaka Setia. mediacenter.palangkaraya.go.id.
- Walikota Palangkaraya Komitmen Wujudkan Smart City. 15 April 2022. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/wali-kota-palangka-rama-komitmen-wujudkan-smart-city/mediacenter.palangkaraya.go.id>.
- Pemerintah Kota Ikuti Penandatanganan MoU Gerakan Menuju Smart City. 1 Maret 2023. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pemko-ikuti-penandatanganan-mou-gerakan-menuju-smart-city/mediacenter.palangkaraya.go.id>.
- Penandatanganan Bersama Komitmen Smart City. 12 Oktober 2023. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/?s=smart+city>
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Ningsih, Endah Widyastuti. 2020. *Analisis Kesiapan Kota Palangkaraya Menuju Smart City*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya.
- Pemerintah Kota Palangkaraya & Kementerian Kominfo RI. Draft I Analisis Strategis Smart City Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2024-2033.
- Pemerintah Kota Palangkaraya & Kementerian Kominfo RI. Draft II Masterplan Smart City Kota Palangkaraya 2024-2033.
- Pemerintah Kota Palangkaraya & Kementerian Kominfo RI. Draft III Executive Summary Masterplan Smart City Palangkaraya 2024-2033.
- Pemerintah Kota Palangkaraya & Kementerian Kominfo RI. Draft IV Profil Quickwins Smart City Kota Palangkaraya.
- Priyono, Tri. 2022. *Evaluasi Kebijakan Program Smart City Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Cirebon*. <http://eprints.ipdn.ac.id/11702/>
- Setiawan, Irfan & Aindita, Elfrida Tri Farah. 2022. *Penerapan Konsep Smart City Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* Vol. 14 No. 1 pp. 97-116. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD>



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License